



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELPINA
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
3. NHK : 420798

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/170 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 234 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 380 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 289 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 141.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS/AVANZA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 55.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	322.696.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.368.946.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.368.946.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ELPINA
NIK : 1871015503720002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA METRO
Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM
Jenis Laporan : Periodik - 2020
Tanggal Kirim : 5 Februari 2021

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.